

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TAHUN 2021**



**PT. Bank Perkreditan Rakyat  
POLLUX**

**Kantor :  
Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang  
Telp : (024) 8448707 Facs. (024) 8448703**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang

Nomor Telepon : 0248448707

Penjelasan Umum : Bagi PT. BPR Pollux, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Pollux. Komitmen Bank untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk : a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
<p>Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai pemenuhan terhadap kekosongan atas PE Audit Intern dengan melakukan pengangkatan PE Audit Intern, sesuai dengan pendapat Dewan Komisaris pada tanggal 19 November 2021 sehingga ditetapkan dan diangkat PE Audit Intern sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/DIR/Pollux/XI/2021 pada tanggal 19 November 2021; 2. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dan Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi &amp; Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan tahunan pada BPR Pollux; 3. Untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, PSP telah melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp 500.000 ribu dan dicatat dalam neraca bank sebagai dana setoran modal serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat No. 064/Pollux-OJK/X/2021 perihal Laporan Rencana Penambahan Modal Disetor tanggal 28 Oktober 2021 4. Bank telah melaksanakan pelatihan penerapan program APU PPT secara in house training kepada seluruh karyawan. selama tahun 2021, pelatihan tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 27 Januari 2021 dan 13 Oktober 2021.</p>			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi Kepada Direksi			
1. Melakukan rekomendasi kepada Direksi untuk mengangkat karyawan untuk pemenuhan terhadap kekosongan jabatan PE Audit Intern ; 2. Merekomendasikan atas penunjukan Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dan Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan tahunan pada BPR Pollux ; 3. Memastikan dan menjaga kinerja agar bank tidak rugi dan modal inti minimum Rp 6 Milyar; 4. Melaksanakan pelatihan penerapan Program APU PPT kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan.			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terdapat komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terdapat komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terdapat komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

masing-masing anggota Direksi BPR Pollux tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

masing-masing anggota Direksi BPR Pollux tidak memiliki saham pada BPR Pollux maupun di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Binarso Hariadi	Binarso Hariadi - Direktur Utama	tidak ada	tidak ada
2	Rinny Listianna	Rinny Listianna - Direktur	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan satu sama lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Binarso Hariadi	Binarso Hariadi - Direktur Utama	tidak ada	tidak ada
2	Rinny Listianna	Rinny Listianna - Direktur - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap anggota Direksi lain dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo	4.860.000.000	37,38

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris atas nama Dewi Anggreini tidak memiliki saham pada BPR Pollux

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo	PT Pollux Properti Indonesia TBK	85,00
2	Nico Purnomo	PT Nakula Investama Indonesia	99,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris atas nama Dewi Anggreini tidak memiliki saham pada BPR Pollux , BPR lain maupun di perusahaan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nico Purnomo	Nico Purnomo	tidak ada	Luciana - Ibu kandung, Dewi Susanti - Kakak kandung, Po Wiwiek Purnomo - Adik Kandung
2	Dewi Anggreini	Dewi Anggreini	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama, Sdr. Nico Purnomo memiliki hubungan keuangan dengan pemegang Saham lainnya, namun tidak terdapat hubungan keuangan terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris Sdri. Dewi Angreini tidak memiliki hubungan keuangan terhadap Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nico Purnomo	tidak ada	tidak ada	Luciana - Ibu kandung, Dewi Susanti - Kakak kandung, Po Wiwiek Purnomo - Adik Kandung
2	Dewi Anggreini	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama, Sdr. Nico Purnomo memiliki hubungan keluarga dengan pemegang Saham lainnya, namun tidak terdapat hubungan keluarga terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris Sdri. Dewi Angreini tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	346000000	3	99000000
2	Tunjangan	3	52000000	2	6000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>398000000</b>		<b>105000000</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Per Desember 2021, terdapat perubahan susunan Pengurus PT BPR Pollux. dari yang sebelumnya Hariyanto sebagai Direktur Utama diganti oleh Binarso Hariadi dan Kasdur Witarto Trisno sebagai Komisaris diganti oleh Dewi Anggreini. Perubahan Susunan pengurus ini berdasarkan keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Pollux tanggal 01 Desember 2021 dan Akta No. 3 oleh Notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom.,SH.,MM.,M.Kn pada tanggal 10 Desember 2021. Perubahan pengurus telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan otoritas Jasa Keuangan sesuai surat OJK No. S-586/KR.0313/2021 tanggal 23 Desember 2021. Untuk pengisian form A0610, jumlah Direksi dan Dewan Komisaris merupakan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris lama dan baru, sehingga jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan dihitung secara kumulatif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Komunikasi	Komunikasi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi adalah berupa mobil dinas, tunjangan komunikasi dan Asuransi Kesehatan, sedangkan fasilitas lain untuk Komisaris hanya berupa Asuransi kesehatan dan tunjangan komunikasi. Untuk Komisaris Utama hanya mendapatkan tunjangan lain berupa tunjangan komunikasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,28	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,60	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,66	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,11	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-02-2021	2	Evaluasi kinerja, evaluasi kredit bermasalah, pembahasan rekomendasi AP dan KAP tahun buku 2020, pembahasan pengembangan bank untuk menambah penyempurnaan skim produk KPR dan pembahasan revisi RBB tahun 2021.
2	28-05-2021	2	isu strategis dan evaluasi kebijakan strategis
3	27-08-2021	2	isu strategis dan evaluasi kebijakan strategis
4	26-11-2021	2	isu strategis dan evaluasi kebijakan strategis

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Nico Purnomo	0	4	0,01
2	Dewi Anggreini	0	4	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama berdomisili di luar provinsi, yaitu di Jakarta. Sehingga frekuensi kehadiran (fisik) ybs selama tahun 2021 khususnya pandemi covid 19 nihil, sehingga dilakukan secara telekonferensi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode tahun sebelumnya dan tahun 2021 jumlah penyimpangan internal nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Pollux

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	50	telah sesuai dengan prosedur bank
2	Lie Iwan Aliwayana	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	66	telah sesuai dengan prosedur bank
3	Lie Iwan Aliwayana	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	179	telah sesuai dengan prosedur bank
4	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	160	telah sesuai dengan prosedur bank
5	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	150	telah sesuai dengan prosedur bank
6	Lie Jemmy	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	82	telah sesuai dengan prosedur bank
7	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa Gedung	12	telah sesuai dengan prosedur bank
8	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa Mobil	4	telah sesuai dengan prosedur bank
9	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa Mobil	3	telah sesuai dengan prosedur bank

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

terdapat sembilan transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara lain : sebanyak 6 (enam) fasilitas kredit pihak terkait dan 3 (tiga) sewa menyewa mobil dan gedung. Semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan saat Pengurus lama masih menjabat, yaitu Sdr. Hariyanto (Direktur Utama sebelum kepengurusan yang baru)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode laporan tidak terdapat kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik